

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## A B S T R A K

Ag. Suwandi, *TRI KOMANDO RAKYAT, Usaha Mengembalikan Irian Barat Ke Pangkuan Republik Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta : Prodi Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma, Nopember 1998.

Pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis tentang : pertama, pencanangan Tri Komando Rakyat; ke dua, perjuangan diplomasi sebelum Tri Komando Rakyat; ke tiga, pelaksanaan Tri Komando Rakyat dan ke empat, reaksi dan dampak Tri Komando Rakyat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dengan penelitian kepustakaan ini, penulis ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data-data yang mendukung konsep rekonstruksi, sebagian besar dalam bentuk pernyataan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meliputi wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang hingga ke Merauke, masih belum seutuhnya tercapai. Daerah Irian Barat masih diduduki oleh Belanda. Belanda menganggap bahwa Irian Barat bukan bagian dari wilayah Indonesia dan penduduknya bukan pula bangsa Indonesia. Tidak ada alasan apapun bagi Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

KMB yang menunda pembicaraan tentang Irian Barat, hanya dipakai sebagai taktik Belanda untuk memperkuat pendudukannya atas Irian Barat dan memisahkannya dari RIS, karena dalam pembentukan RIS Irian Barat tidak disebut-sebut sebagai bagian dari RIS. Usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah RI yang dimulai sejak Kabinet Natsir sampai dengan Kabinet Ali Sastroamijoyo II tidak pernah membawa hasil. Belanda justru mendirikan Dewan Papua pada tanggal 5 April 1961, dengan berbendera sendiri, sebagai usaha untuk melepaskan Irian Barat dari wilayah kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah selama 12 tahun usaha melalui diplomasi selalu gagal, maka pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mencanangkan Tri Komando Rakyat yang bersifat konfrontatif terhadap Belanda. Dimulai gugurnya Komodor Yos Sudarso pada pertempuran Laut Aru yang tidak seimbang, maka RI menyiapkan perang secara besar-besaran untuk menghalau Belanda dari Irian Barat. Persiapan perang ini masih diimbangi oleh usaha diplomasi Menlu Subandrio ke Amerika Serikat, untuk menemui Presiden John F. Kennedy.

Atas tekanan Presiden Kennedy, Belanda bersedia berdamai dengan RI melalui Perjanjian Bunker. Akhirnya Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan RI melalui UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963, maka Irian Barat tidak dapat dipisahkan lagi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRACT

Ag. Suwandi, *TRI KOMANDO RAKYAT (Three Orders of The People)*, The effort to ask back West Irian to the Republic of Indonesia's territory, Paper, Yogyakarta : History Study Program of FKIP Sanata Dharma University, Yogyakarta, November ,1998.

The main problem which is becoming the research object of the paper is describing and analysing about : first, proclaiming the three orders of people; second, diplomacy struggle before the three orders of people; the third, the implementation of the three orders of people and the fourth is the reaction and the effect of the three orders of people.

The method used in this research is a library research. By using this research, the writer would like to explore the basic theory and concept revealed by the researchers. In compiling this paper, the writer is using the qualitative method as most of the data which support this compilation are in statement forms.

The result of the research reveals that Proclamation of Independence, 17 th August 1945 which covered an integral part of former Netherland East Indies from Sabang to Merauke had not been recognized yet. West Irian was still occupied by the Dutch. The Dutch still thought that West Irian was not an integral part of Indonesia and neither were its population. No other reason for the Dutch to transfer West Irian to promote complete sovereignty for the territory of the Republic of Indonesia.

The Round Table Agreements which postponed the talk about West Irian was only used as a tactical maneuver by the Dutch to strengthen its occupation on West Irian as well as to separate West Irian from the integral part of Indonesia. According to the Dutch, it was reasonable because in forming The Union of The Republic of Indonesia, West Irian was not talked about to be a part of it. Diplomacy efforts which were done by the government of The Republic of Indonesia since Natsir Cabinet to Ali Sastroamidjojo II Cabinet never succeeded. On the other hand, the Dutch established Papua Council on 5th April 1961 in order to release West Irian from the integral part of The Indonesian Sovereignty.

After unsuccessful diplomacy efforts for 12 years had been done, on December 1961, President Soekarno declared Three Orders of People to confront with The Dutch. On this confrontation, Commodore Yos Sudarso died on unbalanced battle in Aru Sea. After that The Republic of Indonesia declared to fight against the Dutch and wanted to wipe out the Dutch colonialism from the West Irian. This effort followed by the diplomacy effort to United State led by Foreign Minister Subandrio to see President John F. Kennedy.

Because of John F. Kennedy's pressure, The Dutch was willing to have peace talk. It was called Bunker Peace Agreement. Finally, West Irian was transferred to The Republic of Indonesia under the jurisdiction of a United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA), 1st May 1963, after a plebiscite on self-determination of West Irian's population . Since that time, West Irian cannot be separated from the sovereignty of the Republic of Indonesia.